



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- ~~488~~ - 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

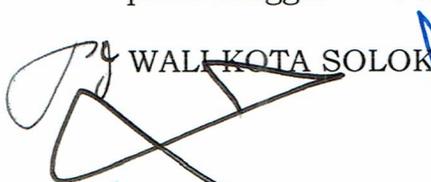
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Wali kota merujuk kepada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali kota ini.
- KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Solok Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Juli 2024

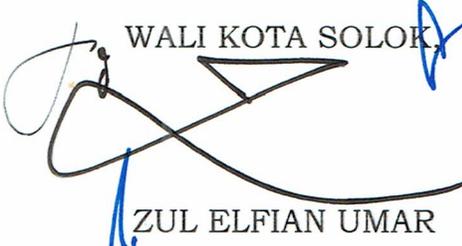

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- -2024
TENTANG : PENETAPAN RENCANA
PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2024

SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026 TERHADAP RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya
	Persentase OPD yang sudah melaksanakan PUG melalui PPRG	%	100
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	84,07
	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja non gaji	%	4,95

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

l

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RANDA PUG) BAGI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH						
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah						
1. Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 : B06 : 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Daerah) 2. Advokasi Peraturan/kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi		B03 : B06 : 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Daerah/Instruksi Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. berlaku sampai dengan tahun 2024 (bagi yang merubah per tahunnya) 2. Scan data dukung pelaksanaan/Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.
				B09:		B09:

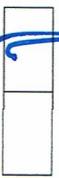


RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	
2. Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersediannya tolok ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota. B12 : -	-	Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota. B12 : -	
3. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RRPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD. 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.	-	B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RRPD. 2. Scan data dukung pelaksanaan RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RRPD 4. Scan daftar data dan informasi perencanaan	
				B09 : -	-	B09 : -	
				B12 : -	-	B12 : -	
				B03 : -	-	B03 : -	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG	
1	2	3	4	5	6	7	
				<p>B06: Rancangan RKKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2.Tersedianya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah <p>B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang memuat substansi :</p>			<p>B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salahsatu dasar hukum (tetap) atau termuat di BAB I</p> <p>2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p> <p>B09: 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024</p>



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
				<p>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I</p> <p>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>		<p>1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum atau termuat di BAB I</p> <p>2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG						
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota						
4. Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	<p>B03 :</p> <p>1. Draft Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota</p>		<p>B03 :</p> <p>1. Scan Draft penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota-</p>
				B06:		B06:



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
dari unsur OPD Kabupaten/Kota				1. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, B09: B12 : B03: B06: B09: B12 : B03: B06: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota B09: B12: B03: B06: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota B09 : B12:		Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota B09: B12 : B03: B06: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota B09: B12: B03: B06: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG B09 : B12:
5. Pembentukan Focal Point pada seluruh OPD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertfasilitasinya Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada masing-masing OPD di Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota	B03: B06: B09: B12: B03: B06: B09: B12: B03: B06: B09: B12: B03: B06: B09: B12: B03: B06: B09: B12:		B03: B06: B09: B12: B03: B06: B09: B12: B03: B06: B09: B12: B03: B06: B09: B12: B03: B06: B09: B12:
6. Penetapan Rencana Kerja PUG Pokja Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: B06: B09 : B12:		B03: B06: B09 : B12:

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

7. Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

7. Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala OPD, kepala Instansi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Kepala OPD dan Jejaring (DPPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada kepala OPD,	B03: B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala OPD, kepala Instansi vertikal,	B03: B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain
---	---------------------------	--	---	--	--

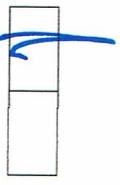


RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
vertikal, anggota DPRD, lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum		dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	kepala Instansi vertikal, anggota DPRD, lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum	anggota DPRD, lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota		undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota
8. Inventarisasi/ta gging Program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang responsive gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terinformasikan ya program dan kegiatan masing-masing OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang responsive gender	Tersedianya data dan informasi tentang program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang responsive gender	B03- B06: B09: 1. Inventarisir kegiatan OPD yang termasuk dalam kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP)		B03: B06: B09: 1. Scan daftar program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang termasuk dalam kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) gender
				B12: -		B12: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
				B06: B09: B12:		B06: B09: B12:
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)						
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah						
9. Pembentukan Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengutusan/gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: Draft Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG		03: 1. Scan Draft Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG 2.
				B06: 1. Ditetapkannya Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 2. Implementasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Advokasi Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota		B06: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Scan bukti implementasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Scan bukti pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten/Kota (dokumentasi)
				B09: B12:		B09: B12:
				B03: B06: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah		B03: B06: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang
10. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun 2024	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	B03: B06: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah		B03: B06: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN %	DATA DUKUNG	
1	2	3	4	5	6	7		
11. Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2024	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	B03 :	3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota		Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota	
				B06 :				B09 :
				B09 :				B12 :
				B12 :				B03 :
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :			B03 :	
				B06 :			B06 :	
				B09 :			B09 :	
				B12 :			B12 :	
				B03 :				

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	
		responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Perubahan Tahun 2024 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	-	B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS PerubahanTahun 2025 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS PerubahanTahun 2025 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS PerubahanTahun 2025 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2025		B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Perubahan tahun 2025 2. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS PerubahanTahun 2025 3. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS Tahun 2025 ke DPRD
				B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025		B12 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Tahun 2025 2. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2025	
12. Penyusunan Dokumen Anggaran yang responsive gender / Gender Budget Statement (GBS) yang dianalisis menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP)	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya program dan kegiatan yang responsive gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	B03: 1. Pelaksanaan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten/Kota B06: 1. Analisis program dan kegiatan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Penyusunan Dokumen Anggaran yang Responsif Gender/Gender Budget Statement(GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten/Kota B06: 1. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2025 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2025 pada kegiatan yang merupakan penugasan	



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
				<p>2024 pada kegiatan yang harus responsive gender dengan kriteria program dan kegiatan yang terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> mengatasi ketimpangan gender yang terjadi penggunaan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) Dalam rangka pencapaian SPM Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. inovasi Daerah 		<p>prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2025 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2025 ada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2025 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/<i>Driver</i> PPRG Kabupaten/Kota (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/<i>Driver</i> PPRG) Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)

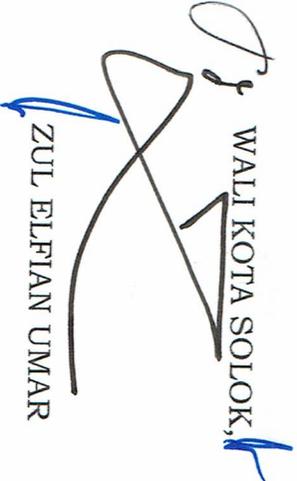
RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG	
1	2	3	4	5	6	7	
				<p>B09: 1. Diliampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah</p> <p>2. Rekapitulasi Kegiatan OPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota</p> <p>B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Sekretariat PUG</p>			<p>B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD</p> <p>2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota</p> <p>B12: 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</p> <p>2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</p> <p>3. Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG</p>



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
13. Inventarisir Inovasi Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terdatanya Inovasi Daerah dalam percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Ditetapkan inovasi daerah terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan	B03: B06: Inventarisir Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar inovasi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir. B09: B12:	B03: B06: Scan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar inovasi terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir. B09: B12:	B03: B06:
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG						
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran						
14. Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya pedoman review dan Pedoman Pengawasan terhadap Implementasi GAP/GBS 1. Tersedianya hasil review terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	1. Tersusunnya pedoman review dan pedoman pengawasan terhadap implementasi GAP/GBS 2. Terlaksananya review terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 3. Terlaksananya hasil pengawasan	B03: B06: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2024 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024. 2. Pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) Periode Januari – Maret 2024 3. Pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) Periode April – Juni 2024 4. Pedoman Reviu yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota	B03: B06: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024. 2. Scan hasil pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) periode Januari – Maret 2024. 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) periode April – Juni 2024	B03: B06:



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN %	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
		2. Tersedianya hasil pengawasan terhadap implementasi GAP/GBS tahun sebelumnya	terhadap implementasi GAP/GBS tahun sebelumnya	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12		4. Scan Pedoman review yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota
				B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 3. Pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) Periode Juli - September 2024		B09: 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota 2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota 3. Scan hasil pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) periode Juli - September 2024
				B12: Pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) Periode Oktober - Desember 2024		B12: Scan hasil pengawasan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2023) periode Oktober - Desember 2024


 WALI KOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR

u